



SISWA SMK DI MALANG PELAJARI HELIKOPTER

Siswa jurusan teknik otomotif mempelajari cara kerja dan rangka mesin helikopter ringan jenis NBO 105 di SMK National Media Center (NMC) Malang, Jawa Timur, Senin (21/8). Helikopter yang sebelumnya milik maskapai Pelita Air tersebut kini digunakan sebagai media edukasi bagi siswa guna menambah literasi tentang teknologi mesin penerbangan.

Pembakaran Sampah Terbuka Faktor Pemicu Polusi Udara di Kab. Tangerang

Selain adanya pembakaran sampah yang menjadi sumber emisi buruk terhadap polusi udara, faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas udara buruk itu disebabkan oleh adanya gas buang dari kendaraan bermotor, kata Kepala Bidang Bina Hukum dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) DLHK Kabupaten Tangerang, Ari Marogo.

TANGERANG (IM)- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, Banten, menyebutkan bahwa pembakaran sampah terbuka atau secara ilegal yang dilakukan masyarakat menjadi salah satu

faktor pemicu polusi udara di wilayah tersebut.

"Kalau pembakaran sampah itu sebenarnya memang jumlahnya sedikit, namun kandungan kadar karbon dioksida (CO₂) yang ditimbulkan itu bahaya," kata Ke-

pala Bidang Bina Hukum dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) DLHK Kabupaten Tangerang, Ari Marogo, di Tangerang, Senin (21/8).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh DLHK Kabupaten Tangerang menyebutkan bahwa kelompok rumah tangga atau masyarakat pada umumnya masih banyak melakukan kegiatan pembakaran sampah secara ilegal. "Ada juga kelompok usaha kecil seperti pembakaran sampah elektronik. Namun, memang ketika kita ke lapangan (pemeriksaan) itu diketahui tidak ada," ujarnya.

Selain adanya pembakaran sampah yang menjadi sumber emisi buruk terhadap polusi udara, menurut dia, faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas udara

buruk itu disebabkan oleh adanya gas buang dari kendaraan bermotor.

"Dari hasil pengujian emisi udara di beberapa wilayah diketahui sumbuangsih terbesar masih bersumber atas emisi tidak bergerak dan bergerak," katanya.

Menurut dia, tingkat konsentrasi sulfur dioksida (SO₂) mengalami peningkatan terutama di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan industri dan pusat lalu lintas. "Memang hasil pengujian ini sifatnya pasif. Jadi, kita pasang alat pengukur itu selama dua minggu, dan kadar yang beredar itu mengandung sulfur dioksida (SO₂) dan hidrogen dioksida," ujarnya.

Ia menyebutkan, hingga saat ini kondisi kualitas udara buruk khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang men-

alami peningkatan, karena konsentrasi polutan mulai naik akibat dipengaruhi masuknya musim kemarau yang menyebabkan konsentrasi partikel debu mengapung di udara meningkat.

Kendati demikian, DLHK Kabupaten Tangerang terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas udara di wilayahnya, termasuk dengan melakukan pengawasan dan mengevaluasi kelompok-kelompok masyarakat serta industri terhadap kinerja dalam pengelolaan kualitas udara.

"Kita saat ini melakukan pengawasan di daerah-daerah tertentu, salah satunya di kawasan pemerintahan, industri, dan permukiman warga serta di pusat lalu lintas seperti di Gerbang Tol Cikupa," kata dia. ● pp

Lahan Pertanian di DIY Turun 150-200 Hektare Per Tahun

YOGYAKARTA (IM) - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY menyebut bahwa tiap tahunnya terus terjadi penurunan lahan pertanian di DIY. Rata-rata, penurunan ini mencapai 150 hektare hingga 200 hektare per tahun.

"Kami tidak melakukan survei secara langsung, cuma rata-rata 150-200 hektare terjadi penurunan. Meski angka itu tidak by survey secara langsung tapi di dalam data-data kami yang kita close dengan data-data perguruan tinggi, dari BPS, itu memang selalu ada penurunan," kata Kepala DPKP DIY, Sugeng Purwanto, Senin (21/8).

Sugeng mengatakan, luas lahan pertanian atau sawah di DIY sekitar 126 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, 104 ribu hektare untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dengan 74 ribu hektare dijadikan LP2B cadangan.

Lahan cadangan tersebut diupayakan untuk tidak berubah fungsinya dari lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam pemanfaatan lahan cadangan ini, katanya, tidak mudah dan harus ada izin agar lahan tersebut tidak berubah fungsi.

"Yang cadangan itu tidak mudah dalam pemanfaatannya, itu untuk pangan dan lain-lain. Karena di DIY itu meski kita bicara lahan pangan

berkelanjutan, tapi faktanya kan dalam lahan itu untuk musim tertentu digunakan untuk non pangan juga," ucap Sugeng.

Lebih lanjut, Sugeng menegaskan bahwa lahan cadangan ini tidak bisa dimanfaatkan dengan bebas dalam rangka menjaga agar lahan pertanian di DIY tidak semakin berkurang. Utamanya untuk kepentingan di luar non pertanian, yang mana penggunaan lahannya akan diawasi dengan ketat.

"Setiap penggunaan lahan cadangan itu juga harus ada izin-izin tertentu, jadi tidak kemudian liar (asal digunakan untuk kepentingan lain). Artinya secara angka (lahan pertanian) menurun, tapi secara komitmen pemerintah ini tetap dengan aturan-aturan agar tidak mudah masyarakat itu mengalihfungsikan lahannya," jelas Sugeng.

"Itu pemanfaatannya pun tidak bisa sebebas-bebasnya, jadi memang harus dengan izin tertentu dalam rangka untuk pemanfaatan lahan. Ini sesuai dengan tata ruang," ungkapnya.

Sugeng menyebut, saat ini luas lahan pertanian yang terbesar di DIY sendiri berada di Kabupaten Gunungkidul. "Karena lahan yang paling luas itu saat ini di Gunungkidul," kata Sugeng. ● pra

Pemprov Banten Terus Fokus Kendalikan Stunting dan Gizi Buruk

SERANG (IM)- Pemerintah Provinsi (pemprov) Banten, Al Muktabar fokus mengendalikan angka prevalensi stunting atau kekecilan yang dialami anak usia bawah lima tahun (balita) serta masalah gizi buruk.

"Pengendalian itu sesuai harapan Bapak Presiden Joko Widodo," kata Pejabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar di Serang, Senin (21/8).

Berdasarkan data angka stunting di Provinsi Banten sampai Maret 2023 menurun 20,1 persen sehingga pemprov memastikan target 14 persen 2024 bisa direalisasikan.

Selain itu, katanya, pengendalian lainnya adalah soal, inflasi serta komitmen bangga buatan Indonesia dan bangga wisata Indonesia.

"Kita berharap ke depan pengendalian-pengen-

dalian itu bisa bermuara pada kesejahteraan masyarakat Banten menjadi lebih baik," katanya menambahkan.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten juga mengoptimalkan pelayanan dasar, seperti sektor pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan terus ditingkatkan, termasuk derajat kesehatan masyarakat untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.

Apabila, pelayanan dasar itu terpenuhi dipantikan dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, sehingga dapat membebaskan stunting dan gizi buruk," kata gubernur menambahkan.

Ia mengatakan Pemprov Banten juga menggandeng berbagai kementerian, investor maupun

perusahaan swasta untuk menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Sebab, penyerapan lapangan pekerjaan diperlukan karena dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Pemprov mengapresiasi terhadap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno yang begitu komitmen membangun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah ini.

Bahkan, penyerapan lapangan pekerjaan cukup besar dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Kami meyakini lapangan pekerjaan itu bisa mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat," pungkas Al Muktabar. ● pra



MUSEUM KELILING KEPRESIDENAN DI JOMBANG

Pengunjung menikmati materi audio visual pada pameran Museum Keliling Koleksi Kepresidenan bertajuk Alunan Melodi Presiden di Museum Islam Indonesia KH Hasyim Asy'ari, Jombang, Jawa Timur, Senin (21/8). Museum Keliling Koleksi Kepresidenan yang digelar mulai 21-27 Agustus 2023 tersebut untuk memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa para presiden juga mempunyai sisi kenangan soal musik disela-sela kesibukannya menjalankan tugas negara.

Kasel Belum Siap Terapkan Kebijakan Kendaraan Listrik

BANJARBARU (IM)- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengaku belum siap menerapkan kebijakan penggunaan kendaraan listrik. Peralnya belum terbangunnya ekosistem kendaraan listrik secara menyeluruh.

"Pada prinsipnya kita mendukung kebijakan kendaraan listrik ini, namun harus kita akui kita belum siap. Kita masih jauh tertinggal dari negara lain," ungkap Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira, Senin (21/8).

DKI Jakarta, kata Fajar, yang sudah menerapkan kendaraan listrik untuk kendaraan pribadi dan masalah belum berjalan dengan baik. Terlebih di daerah seperti Kalsel yang menghadapi banyak kendala.

Ekosistem kendaraan listrik mencakup sejumlah aspek, antara lain infrastruktur pengisian daya, pasokan kendaraan listrik, pasokan baterai dan komponen kendaraan

listrik, kesadaran masyarakat, hingga kebijakan insentif dari pemerintah untuk percepatan penerapan kendaraan listrik. "Pembangunan ekosistem adalah hal yang penting," tuturnya. Di sisi lain kendaraan listrik memiliki sejumlah keunggulan, seperti melindungi dan mengurangi pencemaran udara (polusi), penghematan, serta kesiapan menghadapi semakin berkurangnya sumber energi minyak dan gas di masa depan.

Kalsel saat ini baru memulai kebijakan angkutan massal bus trans Banjarbakula yang menghubungkan sejumlah kabupaten/kota. Trans Banjarbakula masih mengandalkan penggunaan BBM. Sementara untuk kendaraan listrik perkembangan masih terkendala. Beberapa stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SP-KLU) telah dibangun sejak akhir 2022 baik di kawasan perkantoran PLN maupun Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel di Banjarbaru. ● pra

Tak Memenuhi Syarat, 92 Orang di Tansel Gagal Nyaleg

TANGERANG (IM)- Sebanyak 92 Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari jumlah 794 orang di Tangerang Selatan (Tansel) tidak memenuhi syarat dalam tahapan daftar calon sementara (DCS).

Kepala Divisi Teknis KPU Kota Tangerang Selatan, Ajad Sudrajat mengatakan, para Bacaleg yang tidak memenuhi syarat tersebut terjaring dalam tahapan verifikasi admin dan pencermatan daftar calon sementara.

Diketahui, para Bacaleg baik laki-laki dan perempuan yang tidak lolos lantaran belum memperbaiki dokumen persyaratan di KPU.

"Yang TMS (tidak memenuhi syarat), sebenarnya banyak yah. Jadi Bacaleg yang tidak memperbaiki dokumen, menyebabkan menjadi TMS," ungkapnya, Senin (21/8).

Selanjutnya, KPU akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi Bacaleg-bacaleg yang termasuk dalam daftar DCS. Masyarakat dapat memberikan tanggapan dalam batas waktu 10 hari atau 28 Agustus 2023 mendatang.

Adapun tanggapan yang dimaksud meliputi dokumen persyaratan Bacaleg dan mengajukan laporan itu melalui surat ke KPU, dengan disertai identitas diri dan alat bukti otentik, atau bisa membuka portal info Pemilu.

Selain itu, masyarakat dapat ikut berpartisipasi melaporkan jika menemukan tindak pelanggaran ketentuan dari Bacaleg sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU. ● pp



TRADISI MEMETRI BUMI DI LERENG GUNUNG PRAU

Warga menata daun tembakau rajangan saat tradisi Memetri Bumi di kawasan lereng gunung Prau Desa Bonsari, Wonoboyo, Temanggung, Jawa Tengah, Senin (21/8). Petani setempat melangsungkan tradisi Memetri Bumi atau merawat bumi bersamaan dengan musim panen tembakau yang bertujuan melestarikan budaya tradisional dan memohon kepada Tuhan YME agar panen tembakau tahun ini lebih baik.

Selidiki Kasus Video Syur Diduga ASN-nya, Pemkot Tangerang Koordinasi dengan Polisi

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tengah menelusuri kebenaran video syur yang diduga diperankan seorang perempuan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Tangerang. Dalam penelusurannya, Pemkot Tangerang berkoordinasi dengan Polres Metro Tangerang Kota. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Tangerang Kota, Mualim menyebutkan, sejauh ini

polisi sudah membentuk tim khusus investigasi untuk menyelidiki video syur tersebut. "Kami sudah koordinasi dengan kepolisian untuk melakukan investigasi. Pak Kapolres, kemarin juga sudah disampaikan bahwa pihak kepolisian sudah membentuk tim untuk melakukan investigasi," kata Mualim, Senin (21/8).

Untuk itu, Mualim belum dapat memastikan bahwa pemeran dalam video syur itu merupakan ASN Pemkot Tangerang atau bukan. Namun, ia menegaskan apabila video syur itu terbukti diperankan oleh pegawainya, Pemkot Tangerang bakal memberikan sanksi pemecatan tidak hormat.

"Kalau pun nanti itu terbukti pegawai Pemkot Tangerang, tentunya kami akan lakukan langkah-langkah tegas yang sesuai dengan aturan yang ada," ucap Mualim.

"Kalau di aturan pegawai kan bisa pemberhentian tanpa hormat," tambah dia, menegaskan. Sebagai informasi, video rekaman itu sempat dibagikan akun Twitter @lucabonena. Namun, ketika ditelusuri, akun tersebut sudah hilang.

Kendati begitu, dalam video rekaman asusila yang berdurasi 32 detik itu, seorang perempuan berseragam cokelat khas atribut ASN itu tengah berhubungan intim dengan seorang pria. Namun, belum diketahui identitas pemeran tersebut. Sebab, seorang perekam video menyorot perempuan itu dari belakang. Ada pula foto yang menampilkan seragam ASN diduga milik perempuan tersebut, yang berada di atas kasur.

Seragam itu tersemat logo Pemkot Tangerang di bagian lengan kiri. Selain itu, ada juga foto lain yang menampilkan oknum yang diduga ASN Pemkot Tangerang tengah duduk di sofa. Perempuan itu mengenakan pakai dinas yang sama, dengan wajahnya ditutupi emoticon. ● pp